



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, 12110 Telepon (021) 2751502

---

NOTA DINAS  
NOMOR SM04/B/Ms/2026/48

Yth. : 1. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana  
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal  
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga  
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya  
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis  
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU  
9. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  
10. Kepala Pusat, Direktur Politeknik PU, Kepala Balai dan Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, BPSDM

Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hal : Penawaran Program Beasiswa *Split-Site Master's Program (SSMP)* Bappenas Tahun 2026

Tanggal : 9 Januari 2026

---

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan, Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan nomor B-25342/P.01/DL.02.01/12/2025 tanggal 30 Desember 2026 perihal Penawaran Program *Split-Site Master's Program (SSMP)* Bappenas Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga/daerah, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan serta pendukung perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026.
2. Persyaratan :
  - a. Surat usulan dari Pejabat yang Berwenang minimal Eselon II
  - b. Usia maksimal 37 tahun
  - c. Persyaratan lain sebagaimana dalam lampiran(Informasi lebih lanjut dan dokumen persyaratan lengkap dapat dilihat dalam lampiran)
3. Program studi yang ditawarkan merupakan program Split-Site (program 2 gelar dengan perkuliahan di 2 universitas yaitu Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya dan *Master of International Community Development, Victoria University*
4. Mekanisme pengajuan tugas belajar serta pemilihan program studi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR nomor **02 tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.**
5. Calon peserta yang diusulkan wajib memenuhi syarat berdasarkan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi di masing-masing Unit Organisasi dan sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dilamar, serta memenuhi persyaratan tugas belajar dan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga beasiswa.

6. Calon peserta yang diusulkan oleh unit organisasi harus mendapatkan rekomendasi dari BPSDM sebelum mengikuti proses seleksi. Bagi calon yang direkomendasikan melakukan pendaftaran mandiri secara online sesuai dengan ketentuan pihak penyelenggara melalui tautan **<http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>** paling lambat tanggal 24 Januari 2026 (*paperless*). Seluruh dokumen pendukung **WAJIB** diunggah dan dilengkapi dalam Simdiklat Pendaftaran untuk proses verifikasi lebih lanjut. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) serta e-Meterai dapat digunakan.
7. Dokumen pendaftaran *hardcopy* **WAJIB dikirimkan bagi peserta yang lolos hingga tahap proses penempatan**, dapat dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320. (akan diinformasikan lebih lanjut dalam surat resmi).
8. Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh unit organisasi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (***Cost Sharing***) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Biaya yang ditanggung oleh unit organisasi asal yaitu Transport Kedatangan dan Kepulangan ke lokasi studi (kecuali ke luar negeri atau program linkage) dan Uang Saku.
9. Bagi calon peserta yang lulus seleksi beasiswa namun tidak melapor kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Unit Organisasi dan kepada BPSDM pada proses awal pendaftaran, maka rekomendasi untuk penerbitan SK Tugas Belajar dan administrasi lainnya tidak dapat kami proses.
10. Calon peserta yang memenuhi syarat beserta dokumen persyaratan lengkap dapat diusulkan kepada Sekretariat Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi **selambat-lambatnya Kamis, 22 Januari 2026**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia,



Pengecekan Keaslian Dokumen

Lina Anggraini

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : B-25342/P.01/DL.02.01/12/2025 Jakarta, 30 Desember 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penawaran Program Beasiswa *Split-Site Master's Program*  
(SSMP) Bappenas Tahun 2026

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga;
  2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga;
  3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;
  4. Kepala Biro Perencanaan/Bappeda/Bappelitbangda pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.
- (Daftar terlampir)

Pusat Pembinaan, Pendidikan, Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga/daerah, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan serta pendukung perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026.

Program beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2026 meliputi program beasiswa *S2 Linkage* yang mencakup program *Split-Site Master's Program* (SSMP) kerja sama dengan Australia Awards in Indonesia (AAI).

Proses seleksi Program Beasiswa meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA), *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) ITP, dan seleksi lanjutan dengan AAI berupa tes IELTS dan wawancara khusus (diinformasikan lebih lanjut).

Calon peserta Program Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026 diharuskan mendaftar melalui situs **<http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>**. **paling lambat tanggal 24 Januari 2026** (*paperless*). Seluruh dokumen pendukung **WAJIB** diunggah dan dilengkapi dalam Simdiklat Pendaftaran untuk proses verifikasi lebih lanjut. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) serta e-Meterai dapat digunakan dalam proses pendaftaran Beasiswa Bappenas Tahun 2026.

Dokumen pendaftaran *hardcopy* **WAJIB dikirimkan bagi peserta yang lolos hingga tahap proses penempatan**, baik dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320. (akan diinformasikan lebih lanjut dalam surat resmi).

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi untuk diunggah dalam Simdiklat pendaftaran maupun proses pengiriman adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
2. Hasil cetak formulir registrasi online yang telah diisi lengkap, bermeterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Selain itu, apabila dalam kegiatan Seleksi Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026 terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai Pusbindiklatren, Saudara dapat melaporkan tindakan tersebut ke surel **[pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)** atau Inspektorat Utama Kementerian PPN/Bappenas dengan dilengkapi bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya).

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Kelompok Kerja Pendidikan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Telepon: 021 31928280, 31928285

Nomor WhatsApp Official: +62 811-7628-280

Instagram Pusbindiklatren: **<https://www.instagram.com/pusbindiklatren/?hl=id>**

Pos-el: **[pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id)**

Situs: **<http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>**.

Demikian disampaikan, atas perkenan Saudara dalam mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan,  
dan Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Perencanaan Pembangunan



Wignyo Adiyoso

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Lampiran Surat Undangan  
Nomor : B-25342/P.01/DL.02.01/12/2025  
Tanggal : 30 Desember 2025

## DAFTAR UNDANGAN

### **I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:**

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Narkotika Nasional (BNN)
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
10. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
12. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
14. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
16. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
17. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
18. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
19. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
20. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
21. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
23. Kejaksaan Agung
24. Kementerian Agama
25. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
26. Kementerian Dalam Negeri
27. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
28. Kementerian Ekonomi Kreatif
29. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
30. Kementerian Haji dan Umroh
31. Kementerian Hukum
32. Kementerian Hak Asasi Manusia

33. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
34. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
35. Kementerian Kebudayaan
36. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
37. Kementerian Kesehatan
38. Kementerian Ketenagakerjaan
39. Kementerian Komunikasi dan Informatika
40. Kementerian Koperasi
41. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
42. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
43. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
44. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
45. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
46. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
48. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
49. Kementerian Luar Negeri
50. Kementerian Pariwisata
51. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
52. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
53. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
54. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
55. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
56. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
57. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
58. Kementerian Perhubungan
59. Kementerian Pertahanan
60. Kementerian Pertanian
61. Kementerian Sekretariat Negara
62. Kementerian Sosial
63. Kementerian Transmigrasi
64. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
65. Kepolisian Negara Republik Indonesia
66. Komisi Aparatur Sipil Negara
67. Komisi Pemberantasan Korupsi

68. Komisi Pemilihan Umum
69. Komisi Yudisial
70. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)
71. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)
72. Mahkamah Agung
73. Mahkamah Konstitusi
74. Ombudsman Republik Indonesia
75. Otoritas Ibukota Negara
76. Perpustakaan Nasional
77. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
78. Sekretariat Kabinet
79. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
80. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
81. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)
82. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

## **II. SETDA/BADAN KEPEGAWAIAN/BKPSDM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:**

### **1. Provinsi Aceh**

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

## **2. Provinsi Sumatera Utara**

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

## **3. Provinsi Sumatera Barat**

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar

- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

#### **4. Provinsi Riau**

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

#### **5. Provinsi Kepulauan Riau**

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

#### **6. Provinsi Jambi**

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

#### **7. Provinsi Bengkulu**

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur

- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

## **8. Provinsi Sumatera Selatan**

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

## **9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

## **10. Provinsi Lampung**

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan

- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

#### **11. Provinsi Banten**

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

#### **12. Provinsi Jawa Barat**

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

#### **13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

#### **14. Provinsi Jawa Tengah**

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

#### **15. Provinsi Jawa Timur**

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan

- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

#### **16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

#### **17. Provinsi Bali**

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

#### **18. Provinsi Nusa Tenggara Barat**

- 18.1. Kabupaten Bima

- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

## **19. Provinsi Nusa Tenggara Timur**

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

## **20. Provinsi Kalimantan Barat**

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak

20.14. Kota Singkawang

## **21. Provinsi Kalimantan Selatan**

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

## **22. Provinsi Kalimantan Tengah**

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

## **23. Provinsi Kalimantan Timur**

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

## **24. Provinsi Kalimantan Utara**

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan

- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

## **25. Provinsi Gorontalo**

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

## **26. Provinsi Sulawesi Selatan**

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

## **27. Provinsi Sulawesi Tenggara**

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan

- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

## **28. Provinsi Sulawesi Tengah**

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Muntong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

## **29. Provinsi Sulawesi Utara**

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

## **30. Provinsi Sulawesi Barat**

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

## **31. Provinsi Maluku**

- 31.1. Kabupaten Baru

- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

### **32. Provinsi Maluku Utara**

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

### **33. Provinsi Papua**

- 33.1. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.2. Kabupaten Jayapura
- 33.3. Kabupaten Keerom
- 33.4. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.5. Kabupaten Mamberamo Raya
- 33.6. Kabupaten Sarmi
- 33.7. Kabupaten Supiori
- 33.8. Kabupaten Waropen
- 33.9. Kota Jayapura

### **34. Provinsi Papua Barat Daya**

- 34.1. Kabupaten Mamberamo
- 34.2. Kabupaten Raja Ampat
- 34.3. Kabupaten Sorong
- 34.4. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.5. Kabupaten Tambrauw
- 34.6. Kota Sorong

### **35. Provinsi Papua Barat**

- 35.1. Kabupaten Fakfak
- 35.2. Kabupaten Kaimana
- 35.3. Kabupaten Manokwari
- 35.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 35.5. Kabupaten Maybrat
- 35.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 35.7. Kabupaten Teluk Bintuni

35.8. Kabupaten Teluk Wondama

**36. Provinsi Papua Selatan**

36.1.1. Kabupaten Merauke

36.1.2. Kabupaten Boven Digoel

36.1.3. Kabupaten Mappi

36.1.4. Kabupaten Asmat

**37. Provinsi Papua Tengah**

37.1.1. Kabupaten Nabire

37.1.2. Kabupaten Puncak Jaya

37.1.3. Kabupaten Paniai

37.1.4. Kabupaten Mimika

37.1.5. Kabupaten Puncak

37.1.6. Kabupaten Dogiyai

37.1.7. Kabupaten Intan Jaya

37.1.8. Kabupaten Deiyai

**38. Provinsi Papua Pegunungan**

38.1.1. Kabupaten Jayawijaya

38.1.2. Kabupaten Pegunungan Bintang

38.1.3. Kabupaten Yahukimo

38.1.4. Kabupaten Tolikara

38.1.5. Kabupaten Mamberamo Tengah

38.1.6. Kabupaten Yalimo

38.1.7. Kabupaten Lanny Jaya

38.1.8. Kabupaten Nduga

## PROGRAM BEASISWA SSMP BAPPENAS TAHUN 2026

### 1. Informasi Program Beasiswa

Dalam pelaksanaan Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026 (Program Pendidikan), Pusbindiklatren Bappenas menawarkan program beasiswa untuk

**Program Beasiswa *Split-Site Master's Program Australia Awards in Indonesia (SSMP AAI)*, kuota hingga 5 peserta**, merupakan program yang diselenggarakan di salah satu universitas di Indonesia dan salah satu universitas di Australia. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Australia, serta berhak mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Split-Site Master's Program AAI* diselenggarakan pada program studi  
**Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, and**  
**Master of International Community Development, Victoria University**
- b. Setelah memenuhi syarat administrasi, TPA, dan TOEFL ITP, peserta akan mengikuti seleksi lanjutan dengan AAI: proses aplikasi pendaftaran, wawancara dan tes IELTS pada bulan Maret-April 2026 (tentatif)

| NO | PROSES                                          | ESTIMASI                  |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Batas Akhir Pendaftaran Beasiswa SSMP 2026      | 24 Januari 2026           |
| 2  | Seleksi TPA dan TOEFL Beasiswa SSMP 2026        | 7-8 Februari 2026*        |
| 3  | Seleksi Wawancara Beasiswa SSMP 2026            | 15-18 Februari 2026*      |
| 4  | Seleksi Lanjutan IELTS dan Wawancara dengan AAI | Maret – April 2026*       |
| 5  | Pengumuman Karyasiswa Beasiswa SSMP 2026        | Mei 2026*                 |
| 6  | Perkuliahan di Universitas Brawijaya            | Juli 2026 – Agustus 2027* |
| 7  | Pelatihan Bahasa Inggris (IALF Bali)            | Agustus – November 2027*  |
| 8  | Perkuliahan di Victoria University              | Januari – Desember 2028*  |

- c. Bagi peserta yang berminat dengan program SSMP AAI, dapat mengacu kepada ketentuan syarat minimal TOEFL bagi peserta yang tercantum dalam kategori *Equity Target Groups (ETG)* seperti yang tercantum dalam link berikut

**<https://www.australiaawardsindonesia.org/content/32/12/targeting-of-awards?sub=true>**

- d. Pada tahun pertama, karyasiswa yang terpilih mengikuti SSMP AAI akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Indonesia dengan menggunakan sumber dana Beasiswa Bappenas dan selanjutnya akan mengikuti kursus persiapan Bahasa Inggris di IALF yang akan dibiayai oleh pihak AA). Pada tahun kedua, karyasiswa akan mengikuti kuliah di salah satu universitas di Australia dengan menggunakan sumber dana AAI
- e. Seluruh karyasiswa diwajibkan untuk memenuhi standar minimal nilai IELTS yang dibutuhkan dalam proses keberangkatan ke kampus Australia. Jika karyasiswa tidak berhasil mencapai nilai yang disyaratkan oleh pihak AAI, maka karyasiswa akan melanjutkan studi di kampus Indonesia dan hanya akan mendapat 1 gelar saja dari kampus Indonesia

## 2. Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Bappenas Tahun 2025 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran KemenPANRB tersebut dan/atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

| NO | PERSYARATAN                     | BEASISWA SSMP                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengusulan Dari Instansi        | Minimal Eselon II Bagian Kepegawaian (BKD dan/atau Biro Kepegawaian/SDM)                                                                                   |
| 2  | Unit Kerja                      | unit perencanaan di kementerian/lembaga/daerah, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan serta pendukung perencanaan pembangunan |
| 3  | PNS 100% Minimal Golongan III/a | 1 Tahun                                                                                                                                                    |
| 4  | Strata Pendidikan Minimal       | S1/D4 (program tertentu)                                                                                                                                   |
| 5  | Minimal Tahun Lulus D4/S1/S2    | 2 Tahun                                                                                                                                                    |
| 6  | Umur Maksimal*                  | 37 Tahun                                                                                                                                                   |
| 7  | IPK Minimal                     | 2,90                                                                                                                                                       |
| 8  | Tes Potensi Akademik            |                                                                                                                                                            |
|    | Kategori Pusat                  | 565                                                                                                                                                        |
|    | Kategori Pusat Luar Jawa        | 525                                                                                                                                                        |
|    | Kategori Pemda Jawa             | 525                                                                                                                                                        |
|    | Kategori Pemda Luar Jawa        | 500                                                                                                                                                        |
| 9  | TOEFL Minimal                   | 552/495***                                                                                                                                                 |

Keterangan :

- Hanya pada beberapa program studi menerima peserta dengan latar belakang pendidikan D4.
- Tanggal lahir maksimal yang dapat diterima ialah 1 September 1989 (S2) atau batas maksimal usia pendaftar ialah 37 pada bulan Agustus 2026
- Hanya berlaku pada calon peserta yang tercantum dalam *Equity Target Groups* (ETG), yakni **People with Disability, Disadvantage Women dan People from equity target provinces**

(<https://www.australiaawardsindonesia.org/content/32/12/targeting-of-awards?sub=true>)

Selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas, masing-masing program studi juga memiliki perbedaan persyaratan tersendiri terutama yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan minimal apakah dimungkinkan D4 atau S1.

Selain itu, pada penyelenggaraan Beasiswa SSMP Bappenas Tahun 2026, Pusbindiklatren Bappenas akan mengokomodir peserta penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik pada anggota gerak, bukan disabilitas sensorik atau intelektual dan mental.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:

- Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun\*

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 resmi menetapkan 30 kabupaten baru sebagai Daerah Tertinggal untuk periode pembangunan 2025–2029.

| NO | PROVINSI            | KABUPATEN          | KETERANGAN |
|----|---------------------|--------------------|------------|
| 1  | Sumatera Utara      | Nias Utara         | -          |
| 2  | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat Daya   | -          |
| 3  | Nusa Tenggara Timur | Sumba Tengah       | -          |
| 4  | Nusa Tenggara Timur | Sabu Raijua        | -          |
| 5  | Papua Pegunungan    | Pegunungan Bintang | -          |
| 6  | Papua Pegunungan    | Memberamo Tengah   | -          |
| 7  | Papua               | Supiori            | -          |
| 8  | Papua               | Waropen            | -          |
| 9  | Papua               | Memberamo Raya     | -          |
| 10 | Papua Selatan       | Asmat              | -          |
| 11 | Papua Selatan       | Mappi              | -          |
| 12 | Papua Selatan       | Boven Digoel       | -          |
| 13 | Papua Tengah        | Puncak             | -          |
| 14 | Papua Tengah        | Puncak Jaya        | -          |
| 15 | Papua Tengah        | Intan Jaya         | -          |
| 16 | Papua Tengah        | Deiyai             | -          |
| 17 | Papua Tengah        | Dogiyai            | -          |

| NO | PROVINSI         | KABUPATEN         | KETERANGAN |
|----|------------------|-------------------|------------|
| 18 | Papua Tengah     | Paniai            | -          |
| 19 | Papua Pegunungan | Jayawijaya        | -          |
| 20 | Papua Pegunungan | Lanny Jaya        | -          |
| 21 | Papua Pegunungan | Yalimo            | -          |
| 22 | Papua Pegunungan | Yahukimo          | -          |
| 23 | Papua Pegunungan | Tolikara          | -          |
| 24 | Papua Pegunungan | Nduga             | -          |
| 25 | Papua Barat Daya | Maybrat           | -          |
| 26 | Papua Barat Daya | Tambrau           | -          |
| 27 | Papua Barat      | Manokwari Selatan | -          |
| 28 | Papua Barat      | Pegunungan Arfak  | -          |
| 29 | Papua Barat      | Teluk Bintuni     | -          |
| 30 | Papua Barat      | Teluk Wondama     | -          |

\*Hanya berlaku untuk ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten diatas.

### 3. Prosedur Pelamaran

- Mereka yang berhak melamar program beasiswa adalah mereka yang memenuhi persyaratan dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
- Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program beasiswa yang diminati;
- Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan;
- Jika peserta mengalami kesulitan** dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
- Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermeterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
- Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
  - Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang

diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;

- Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
- Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
- Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
- Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan *Workshop* Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;
- Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; serta
- Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.

#### **4. Komponen Biaya**

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

## Zonasi Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Bappenas Tahun 2026

| NO | KOTA              | TUNJANGAN<br>BIAYA HIDUP | TUNJANGAN<br>BUKU | TOTAL<br>TUNJANGAN<br>BIAYA HIDUP | ZONASI |
|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------|
| 1  | Padang            | Rp.1.900.000             | Rp.200.000        | Rp.2.100.000                      | Zona 1 |
| 2  | Aceh              |                          |                   |                                   |        |
| 3  | Palembang         |                          |                   |                                   |        |
| 4  | Yogyakarta        |                          |                   |                                   |        |
| 5  | Bandung           | Rp.2.300.000             | Rp.200.000        | Rp.2.500.000                      | Zona 2 |
| 6  | Makassar          |                          |                   |                                   |        |
| 7  | Malang            |                          |                   |                                   |        |
| 8  | Bogor             |                          |                   |                                   |        |
| 9  | Semarang          |                          |                   |                                   |        |
| 10 | Denpasar          |                          |                   |                                   |        |
| 11 | Surabaya          | Rp.3.200.000             | Rp.200.000        | Rp.3.400.000                      | Zona 3 |
| 12 | DKI Jakarta       |                          |                   |                                   |        |
| 13 | Depok             |                          |                   |                                   |        |
| 14 | Tangerang Selatan |                          |                   |                                   |        |

### 5. Sanksi

- Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021;
- Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai

dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Bappenas (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;

c. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:

- Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan
- Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan
- Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari

## 6. Format Pernyataan Rencana Studi

Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;

Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

## 7. Panduan Registrasi Online

a. Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas

- ✓ Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
- ✓ Masukkan NIP Anda lalu  klik CEK
- ✓ Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu  klik DAFTAR.
- ✓ Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
- ✓ Lalu  klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
- ✓ Bila ada pertanyaan atau *Alert*  klik OK

b. Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas

- ✓ Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu **Lupa Password**: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;
- ✓ Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) Perihal *up date email* Anda;

- ✓ Lalu  klik KIRIM;
- ✓ Kemudian lihat *email* dan  klik *link Forgot Password*;
- ✓ Jika terdapat peringatan/*Alert*  klik OK;
- ✓ Silakan  klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
- ✓ Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
- ✓ Setelah formulir diisi semua lalu  klik DAFTAR/UBAH;
- ✓ Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisi  klik UNDUH

KOP SURAT  
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM  
**SURAT PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : .....

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program studi Beasiswa Bappenas dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**TIDAK DIWAJIBKAN  
MELENGKAPI KELIMA PILIHAN**

Pilihan-pilihan program studi tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2026

**Kepala BKD/Kepala Biro SDM,**

**(Materai 10.000, TTD dan Cap Basah)**

(.....)  
NIP

Tembusan:

Atasan langsung yang bersangkutan.

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS**  
**FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA**  
**(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.**  
**HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)**

- 
1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) : .....
  2. NIP : .....
  3. Tempat, Tanggal Lahir : .....
  - Jenis Kelamin : L/P
  4. Alamat Rumah : .....
  - Kode Pos : .....
  - Kota/Kabupaten : .....
  - Provinsi : .....
  - Telepon/Handphone : .....
  5. Email Address : .....
  6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) : .....
  7. Unit Kerja Eselon II/III : .....
  8. Alamat Kantor : .....
  - Kode Pos : .....
  - Kota/Kabupaten : .....
  - Provinsi : .....
  - Telepon/Handphone : .....
  - Email Instansi : .....
  9. Jabatan : .....
  - Golongan : .....
  10. Unit/Bagian Tempat Bekerja : .....
  - Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
  - Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
  11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :  
.....  
.....  
.....  
.....
  - TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 : .....
  - Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A : .....
  12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1/S2
  - Perguruan Tinggi : .....

Fakultas (DIV/S1/S2) : .....  
Jurusan : .....  
Lulus Tahun (DIV/S1/S2) : .....  
IPK : ..... dari .....

13. Selain Beasiswa Bappenas, apakah sedang mengikuti beasiswa di instansi lainnya?  
Ya/Tidak

14. Apakah Saudara termasuk dalam kategori Difabel/Disabilitas ? Ya/Tidak

15. Jika Saudara termasuk dalam kategori Difabel/Disabilitas, jelaskan perihal kondisi tersebut ? .....

16. Pilihan Rencana Studi S2 :

Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan dalam kurung yang tersedia :

(.....) Program S2 SSMP MAP UB – Victoria University

17. Tuliskan rencana studi pada program S2 prioritas pertama Saudara ke dalam esai maksimal 500 kata, yang terdiri dari (a) Latar belakang bidang studi Saudara; (b) Pengalaman kerja yang menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi Saudara serta yang anda lakukan di instansi Saudara; (c) Alasan memilih program gelar prioritas pertama Saudara, serta; (d) Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia. Silakan menggunakan kertas tambahan jika diperlukan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Menyetujui,

(Kepala BKD/Kepala Biro SDM)  
(TTD dan Cap Basah)

(.....)

..... 2026

Yang Bersangkutan,

(Materai 10000 Rupiah)

(.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.